

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)  
PERIODE 2009 - 2011**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**HARERA ANGGA KUSUMA**

**NIM. C2B007024**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Harera Angga Kusuma

Nomor Induk Mahasiswa : C2B007024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT  
USAHA RAKYAT (KUR) PERIODE 2009-2011**

Dosen Pembimbing : Dr. Nugroho SBM, MSP.

Semarang, 19 Agustus 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. Nugroho SBM, MSP)

NIP. 196105061987031002

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Harera Angga Kusuma  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007024  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP  
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT  
USAHA RAKYAT (KUR) PERIODE 2009-2011**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Agustus 2014**

Tim Penguji

1. Dr. Nugroho SBM, MSP (.....)
2. AchmaHendraSetiawan,SE,M.Si(.....)
3. FitrieArianti,SE,M.Si (.....)

MengetahuiPembantuDekan I

AnisChariri, SE, M.Com., Ph. D,Akt  
NIP.196708091992031001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Harera Angga Kusuma, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PERIODE 2009-2011** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atautidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemungkinan terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan,

(Harera Angga Kusuma)

NIM : C2B007024

## ABSTRACT

*The role of MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) has been recognized quite large parties in the national economy. In such a strategic position, on the other hand SMEs still face many problems and obstacles in implementing and developing its business activities primarily in terms of capital. In connection with the efforts to address the problem of capital MSME, Ministry of Cooperatives and SMEs also initiated a capital strengthening program through the People's Business Credit (KUR). KUR program supported by six commercial banks, namely BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, and Bukopin, as well as two insurance companies that Means Business Development Public Corporation (Perum SPU) is now transformed into a Housing Credit Guarantee Indonesia (Perum Jamkrindo) and PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo). KUR is guaranteed by the government by 70 percent through Jamkrindo and PT Perum Askrindo. However, in practice occurred some slowdown in the distribution so that the resulting outcome is not optimal. Based on the data, it appears that the KUR huge slowdown in 2010 that number has decreased to almost 50%. In 2011 and 2012, it appears that despite increased KUR has not reached the expected level as in 2007 to 2009 slowdown KUR is based on previous research thought to be influenced by the level of inflation, interest rates, economic growth, NPL and CAR.*

*The dependent variable in this study is the People's Business Credit (KUR). The independent variables in this study are inflation, interest rates, economic growth, NPL and CAR. The sample used in this study were 36 months for three years ie 2009-2011. The data used are secondary data. Data collection methods used in this study are: a method of documentation. The analysis technique used is multiple linear regression.*

*According to analysis done can be seen that there is no significant effect of the inflation on KUR, SBI KUR negatively affect GDP negatively affect the KUR, the NPL does not affect the KUR, and CAR did not affect the KUR. The most dominant factor in affecting change KUR is GDP. While KUR able to be explained by the independent variables, namely inflation, SBI, GDP, NPL and CAR of 49.6%.*

*Key words: inflation rates, interest rates, economic growth, NPL, CAR, the People's Business Credit.*

## ABSTRAK

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya terutama adalah dari segi permodalan. Sehubungan dengan upaya mengatasi masalah permodalan UMKM, Kementerian Negara Koperasi dan UKM turut memprakarsai program perkuatan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR didukung oleh enam bank umum, yaitu BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan Bukopin, serta dua perusahaan penjaminan yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) sekarang berubah menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo). KUR dijamin oleh pemerintah sebesar 70 persen melalui Perum Jamkrindo dan PT Askrindo. Namun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perlambatan dalam penyalurannya sehingga hasil yang dihasilkan tidak maksimal. Berdasarkan data, terlihat bahwa penyaluran KUR mengalami perlambatan yang sangat besar pada tahun 2010 dimana jumlahnya mengalami penurunan hingga mencapai hampir 50%. Pada tahun 2011 dan 2012, terlihat bahwa penyaluran KUR mengalami peningkatan walaupun belum mencapai level yang diharapkan seperti tahun 2007 hingga 2009. Perlambatan penyaluran KUR ini berdasarkan penelitian terdahulu diduga dipengaruhi oleh tingkat inflasi, suku bunga bank, pertumbuhan ekonomi, NPL dan CAR.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, NPL dan CAR. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 36 bulan selama tiga tahun yaitu 2009-2011. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi terhadap KUR, SBI berpengaruh negatif terhadap penyaluran KUR, PDB berpengaruh negatif terhadap terhadap KUR, NPL tidak berpengaruh terhadap KUR, dan CAR tidak berpengaruh terhadap KUR. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi Perubahan KUR adalah PDB. Sedangkan KUR mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu Inflasi, SBI, PDB, NPL dan CAR sebesar 49,6%.

Kata kunci : tingkat inflasi, suku bunga bank, pertumbuhan ekonomi, NPL, CAR, Kredit Usaha Rakyat.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita bersama dan khususnya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diberi judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PERIODE 2009 - 2011”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana pada Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya.
2. Ayah H. Teguh Hartanto, SH, MM. dan Ibu Hj. I Sri Wuryanti, Bsc. tercinta atas doa, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, bimbingan, nasehat, bekal ilmu hidup, dan segalanya sehingga penulis dapat melewati segala sesuatu dalam menjalankan hidup
3. Bapak PROF. SUDARTO P HADI, MES., PH.D. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak Dr. Nugroho SBM, MSP. selaku Dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk arahan, bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi sampai selesai.
6. Ibu Dra. Hj. Tri Wahyu R, M.Si. selaku Dosen wali atas bimbingan dan ilmu yang bermanfaat.
7. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.
8. Kakakku Harlyndha Anindya Putri, adikku Paundra Arga Prahita dan Tegar Indhira Tafta yang terus memberi doa dan semangat.
9. Teman-teman IESP angkatan 2007, Indo Man Utd Semarang, Volkswagen Semarang Club, Cacing's Family, Futsal AD Astra yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran yang berharga kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan dengan yang lebih baik.

Demikian penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan guna perbaikan selanjutnya serta semoga bermanfaat.

Semarang, 19 Agustus 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Manfaat Penelitian .....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Kredit.....	14
2.1.2 Lembaga Keuangan .....	19

2.1.3 Bank.....	23
2.1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	26
2.1.5 Kredit Usaha Rakyat.....	30
2.1.6 Inflasi .....	33
2.1.7 Suku Bunga .....	37
2.1.8 Pertumbuhan Ekonomi .....	40
2.1.9 NPL ( <i>Non Performing Loan</i> ).....	49
2.1.10 CAR ( <i>Capital Adequacy Ratio</i> ).....	51
2.2 Hubungan antara variable dependen dengan variable independen .....	52
2.2.1 Hubungan Antara Inflasi dengan Penyaluran KUR .....	52
2.2.2 Hubungan Antara Suku Bunga Kredit dengan Penyaluran KUR....	53
2.2.3 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Penyaluran KUR	53
2.2.4 Hubungan Antara NPL dengan Penyaluran KUR .....	54
2.2.5 Hubungan Antara CAR dengan Penyaluran KUR .....	55
2.3 Penelitian Terdahulu .....	56
2.4 Kerangka Pemikiran.....	58
2.5 Hipotesis .....	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	60
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	60
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	60
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	61
3.4 Analisis Regresi Linier Berganda .....	61
3.4.1 Model Regresi .....	61

3.4.2 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik .....	62
3.4.3 Pengujian Hipotesis .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian.....	68
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	69
4.2.1 Inflasi (INF).....	70
4.2.2 Suku Bunga (BUNGA).....	70
4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi (PEKO).....	71
4.2.4 <i>Non Performing Loan</i> (NPL).....	72
4.2.5 <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	72
4.2.6 Penyaluran KUR (KUR).....	73
4.3 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	74
4.3.1 Deteksi Multikolinieritas .....	74
4.3.2 Deteksi Heteroskedastisitas .....	75
4.3.3 Deteksi Normalitas .....	76
4.3.4 Deteksi Autokorelasi .....	78
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda .....	79
4.5 Pengujian Hipotesis .....	80
4.5.1 Uji Hipotesis Parsial (t Test) .....	80
4.5.2 Uji Kelayakan Model ( <i>Goodness Of Fit</i> ) .....	82
4.6 Analisis Koefisien Determinasi .....	83
4.7 Pembahasan.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>

5.1 Kesimpulan .....	88
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN A .....	94
LAMPIRAN B .....	95
LAMPIRAN C .....	103

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran KUR untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (dalam miliar).....	6
Tabel 1.2 Laju Inflasi, BI Rate dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .....	6
Tabel 2.1 Tabel Kriteria Jumlah Karyawan .....	28
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	56
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif Statistik.....	69
Tabel 4.2 Hasil Deteksi Multikolinearitas .....	74
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov .....	78
Tabel 4.4 Hasil Deteksi Autokorelasi .....	79
Tabel 4.5 Persamaan Regresi Linier Berganda .....	79
Tabel 4.6 Hasil Uji F.....	83
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi.....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pola KUR Mikro .....	30
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	58
Gambar 4.1 Laju Inflasi 2009-2011 .....	70
Gambar 4.2 SBI 2009-2011 .....	70
Gambar 4.3 PDB 2009-2011 .....	71
Gambar 4.4 NPL 2009-2011 .....	72
Gambar 4.5 CAR 2009-2011 .....	72
Gambar 4.6 KUR 2009-2011 .....	73
Gambar 4.7 Hasil Deteksi Heterokedastisitas .....	76
Gambar 4.8 Hasil Deteksi Normalitas .....	77

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A Data Hasil Penelitian

Lampiran B Hasil Analisis Deskriptif dan Regresi dengan Output SPSS

Lampiran C Data Pendukung Lainnya

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: (a) jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; (b) menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; (c) memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain : 1) manajemen, 2) permodalan, 3) Teknologi, 4) bahan baku, 5) informasi dan pemasaran, 6) infrastruktur, 7) birokrasi dan pungutan, serta 8) kemitraan (Depkop.go.id, 2013).

Dari beragamnya masalah dan kendala yang dihadapi UMKM, tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKM, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha. Kemampuan UMKM yang lemah dalam mengakses permodalan terutama kepada lembaga keuangan formal selalu menjadi bahan perbincangan yang tidak habis-habisnya, seolah-olah menjadi kendala yang sulit



dicarikan pemecahannya oleh para ahli di negeri ini. Dari jumlah unit UMKM yang mencapai angka 49,8 juta yang tersebar di seluruh wilayah di semua sektor usaha (BPS, 2013) hanya sekitar 39 % atau 19,4 juta yang telah memperoleh kredit perbankan, sedangkan sisanya belum sama sekali tersentuh lembaga perbankan.

Sebagian besar dari UMKM yang berjumlah 49,8 juta tersebut atau sekitar 95,7 % adalah usaha mikro : usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha bersifat informal lainnya. Pada skala ini pula paling banyak menyerap tenaga kerja dan menopang peningkatan taraf hidup masyarakat, diperkirakan 91,8 juta orang (97,3%) dari total kesempatan kerja. Selain itu, kontribusi UMKM dalam PDB nasional mencapai Rp. 2.121,3 triliun (53,6%) dari total PDB, kontribusi ekspor mencapai Rp 142,8 triliun (20%) dari total ekspor non migas, investasi fisik UMKM, mencapai Rp 462,01 triliun (46,9%) (BPS, 2013).

Sebagaimana diketahui, bahwa krisis finansial global telah berdampak besar pada sektor riil yang sebagian besar digeluti UMKM. Antisipasi dan langkah-langkah penyelamatan agar sektor riil bisa bertahan dan terselamatkan perlu selalu diupayakan dengan memberikan dukungan permodalan kepada UMKM yang terkena krisis. Untuk itu, diperlukan langkah berani dari pemerintah melalui kebijakan yang mendorong perbankan untuk memberikan kelonggaran kepada UMKM yang memerlukan modal, karena pada umumnya walaupun UMKM telah feasibel namun belum bankabel, pada sisi lain perbankan dituntut

menerapkan manajemen risiko yang standar dan tidak cocok dengan kondisi UMKM (Depkop.go.id, 2013).

Sehubungan dengan upaya mengatasi masalah permodalan UMKM sebagaimana uraian di atas, Kementerian Negara Koperasi dan UKM turut memprakarsai program perkuatan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun tujuan diluncurkannya KUR adalah (1) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM; (2) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan koperasi; (3) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. KUR adalah skim penjaminan kredit yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan yang dijamin oleh Perum Jamkrindo dan PT Askrindo. Program KUR telah diresmikan oleh Presiden pada tanggal 5 November 2007. Program ini khusus ditujukan untuk memperkuat permodalan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM) secara perorangan, sedangkan bagi kelompok disalurkan melalui koperasi. Program KUR didukung oleh enam bank umum, yaitu BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, dan Bukopin, serta dua perusahaan penjaminan yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) sekarang berubah menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo). KUR dijamin oleh pemerintah sebesar 70 persen melalui Perum Jamkrindo dan PT Askrindo. Dalam waktu lima tahun ke depan mulai tahun 2010 diharapkan dapat mengucurkan dana kepada UMKM dan koperasi sebesar Rp 100 triliun. Kebijakan ini jelas

menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberdayakan UMKM dan koperasi dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran (Depkop.go.id, 2013). Melalui pola perkreditan seperti KUR, yang bersifat kredit masal, maka harapan tersebut optimis terpenuhi mengingat calon penerima kredit tidak diwajibkan untuk menyediakan jaminan tambahan, seperti pada kredit lainnya yang terikat dengan ketentuan bank teknis (Depkop.go.id, 2013).

Terkait dengan percepatan penyaluran KUR, Tim Pengendalian Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (TP3UMK) dan Tim Koordinator Program Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengeluarkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut (Depkop.go.id, 2013):

1. Program KUR terdiri dari: KUR Mikro (sampai dengan Rp 5 juta), KUR biasa (Rp 5 s/d Rp 500 juta) dan KUR Linkage (lebih besar dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 2 miliar);
2. Meningkatkan *capacity building* untuk konsultan keuangan mitra bank (KKMB), LKM, dan koperasi;
3. Mengadakan sosialisasi dan evaluasi program KUR;
4. Membuat pemeringkatan/*rating* LKM yang ikut program *linkage* dengan pelaksana *rating* oleh lembaga independen.

Realisasi penyaluran KUR sampai tanggal 31 November 2009 telah mencapai Rp 16,45 triliun (KUR dan KUR Mikro), dimana KUR Mikro hanya disalurkan oleh BRI dengan nilai sebesar Rp 9,15 triliun. BRI merupakan bank terbesar dalam menyalurkan KUR, diikuti oleh Bank Mandiri dan BNI, sedangkan sektor terbesar yang menyerap KUR adalah sektor perdagangan Rp 8,41 triliun

(54,8%) dan sektor pertanian sebesar Rp 4,17 triliun (27,2%). Pada sisi lain, provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan provinsi yang cukup besar dalam menyerap dana KUR yaitu di atas 10 %, sedangkan untuk provinsi lain rata-rata berkisar antara 0,3% - 6 % (BPS, 2013).

Selama periode 2008 penyaluran KUR sangat efektif bila dibandingkan dengan periode 2009. Kecepatan penyaluran KUR bisa jadi disebabkan tingginya semangat perbankan dalam menyalur KUR, sosialisasi yang cukup efektif dikalangan perbankan dan masyarakat, kebijakan ATMR yang semakin longgar serta banyaknya permintaan calon debitur KUR yang layak namun kurang bankable. Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Melalui fungsi ini bank berperan sebagai *Agent of Development* (Susilo, Triandaru, dan Santoso, 2006).

Namun dalam perkembangannya mulai Nopember 2009 terjadi trend perlambatan penyaluran KUR, diduga disebabkan oleh siklus usaha yang umumnya terjadi pada setiap semester dalam tahun yang bersangkutan. Khususnya perlambatan penyaluran KUR dalam tahun 2009 terjadi karena bank mengalami kesulitan likuiditas sebagai dampak krisis keuangan global, adanya kekuatiran melakukan ekspansi kredit sebagai akibat dari mulai meningkatnya non performance loan semua jenis kredit serta semakin sulitnya bank mendapatkan nasabah baru yang belum pernah mendapatkan kredit/pembiayaan dari perbankan.

Selain itu, Bank yang memiliki jumlah kantor layanan yang banyak dan menyebar di seluruh pelosok, memiliki jumlah *account officer* yang lebih banyak, berpengalaman dan terbiasa dalam menyalurkan kredit mikro, memiliki jarak/radius pelayanan yang mendekati lokasi debitur mempengaruhi realisasi penyaluran KUR (Pratama, 2010).

**Tabel 1.1**  
**Penyaluran KUR untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (dalam miliar)**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Penyaluran KUR</b>	524.174,5	660.445,3	766.901,4	394.298,9	479.886,5	552.226,1

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Berdasarkan data pada tabel 1.1, terlihat bahwa penyaluran KUR mengalami penurunan yang sangat besar pada tahun 2010 dimana jumlahnya mengalami penurunan hingga mencapai hampir 50%. Pada tahun 2011 dan 2012, terlihat bahwa penyaluran KUR mengalami peningkatan walaupun belum mencapai level yang diharapkan seperti tahun 2007 hingga 2009. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyaluran KUR antara lain laju inflasi, BI rate dan pertumbuhan ekonomi (Depkop.go.id, 2013).

**Tabel 1.2**  
**Laju Inflasi, BI Rate dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Inflasi</b>	2,78%	6,96%	3,79%	4,3%
<b>Suku Bunga BI</b>	7%	6,5%	6,5%	5,75%
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	4,5%	6,1%	6,5%	6,3%
<b>NPL</b>	24,74%	16,47%	17,43%	18,76%
<b>CAR</b>	16,96%	16,4%	17,24%	18,41%

Sumber : BPS (2013) dan [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Masalah umum yang sering dihadapi negara berkembang adalah tingginya tingkat inflasi. Sejak krisis moneter tahun 1998, harga-harga di pasaran cenderung naik. Tahun 2009 tingkat

inflasi di Indonesia adalah 2,78 %. Hal ini bisa diartikan bahwa aktiva yang dimiliki harganya akan berkurang sebesar 2,78% sedangkan pendapatan dinilai terlalu tinggi sebesar angka yang sama. Namun pada 2010, tingkat inflasi meningkat hingga 6,96%, lalu mengalami penurunan hingga 3,79% pada 2011 sebelum meningkat menjadi 4,3% pada tahun 2012. Inflasi merupakan masalah yang penuh perhatian di negara manapun. Sebagai contoh, inflasi dapat mengakibatkan meremehkan akun neraca (yaitu persediaan) dan biaya (yaitu penyusutan). Dalam lingkungan pinjaman kredit, inflasi dapat mempengaruhi keputusan untuk meminjamkan kredit.

Penyaluran kredit kepada nasabah yang membutuhkan kredit (debitur) harus melalui suatu prosedur yang harus dilakukan secara profesional dan hati-hati, dimana prosedur tersebut mungkin berbeda antara suatu bank dengan bank lainnya. Namun secara umum dijelaskan bahwa tahap-tahap penyaluran kredit terdiri dari wawancara dengan calon debitur, analisa laporan keuangan, penilaian jaminan, pemeriksaan dokumen-dokumen hukum dan tahap memutuskan kredit yang biasanya dilakukan oleh beberapa pejabat kredit bank. Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini juga sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian negara yang cenderung digambarkan dalam bentuk inflasi.

Tingkat suku bunga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkreditan di pasar kredit dimana tingkat suku bunga yang berlaku menunjukkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi kredit. Bagi peminta kredit maka bunga yang rendah akan sangat diminati dan sebaliknya jika bunga tinggi maka mereka akan berfikir dan tidak berminat untuk mengambil

kredit. Suku bunga berpengaruh langsung terhadap tingkat suku bunga kredit perbankan.

Suku bunga kredit mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kredit. Semakin tinggi suku bunga kredit maka akan menyebabkan beban masyarakat dalam melunasi pinjaman kreditnya semakin berat, dan akan mengurangi minat masyarakat untuk melakukan pinjaman kredit yang berakibat menurunnya kredit yang disalurkan. Sebaliknya semakin rendah tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan maka beban masyarakat akan lebih ringan yang berdampak meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat (Wardoyo, 2003). Terlihat pada tabel 1.2, bahwa pemerintah telah berusaha menurunkan tingkat suku bunga Bank Indonesia mulai 7% pada 2009 hingga menjadi 5,75% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin meningkatkan penyaluran KUR kepada usaha mikro kecil dan menengah.

Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu yang mempengaruhi penyaluran KUR. Model Pertumbuhan Ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod-Domar, menekankan betapa pentingnya masyarakat untuk menabung guna mendukung kegiatan investasi yang akan mendorong pertumbuhan yang direpresentasikan oleh peningkatan pendapatan nasional. Untuk peningkatan pendapatan nasional diperlukan tambahan kapital stok dalam jumlah tertentu, sehingga terdapat rasio antara pendapatan nasional dan kapital stok (*capital-output ratio*). Model Harrod-Domar menunjukkan betapa pentingnya tabungan (*saving*) untuk mendukung investasi guna menciptakan pertumbuhan. Menurut Domar Peningkatan tabungan akan meningkatkan kapital stok, yang berarti

tersedianya dana untuk mendukung investasi. Penyaluran dana kepada dunia usaha maka akan dapat meningkatkan output yang dihasilkannya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini mencapai 6,3% pada tahun 2012, hal ini mengindikasikan terdapat pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi ini juga diharapkan dapat meningkatkan penyaluran KUR.

Salah satu komponen dari pertumbuhan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pertumbuhan ekonomi (Sadono Sukirno, 2004). Dapat dijelaskan bahwa, jika suatu negara atau daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka mereka beranggapan untuk tidak beresiko mengambil kredit. Dengan kata lain bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkatkan kemampuan dan keinginan untuk melakukan ekspansi dan untuk melakukan ekspansi membutuhkan modal yang lebih besar. Dalam hal ini untuk melakukan ekspansi tersebut, seorang wirausahawan akan memutuskan untuk mengambil kredit. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyaluran kredit.

*Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.



*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.

Penelitian Lolong (2013) tentang pengaruh suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit memberikan hasil bahwa suku bunga kredit berpengaruh terhadap peningkatan penyaluran kredit. Penelitian Dondo (2013) tentang pengaruh suku bunga kredit dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit modal kerja memberikan hasil bahwa suku bunga kredit dan tingkat laju inflasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit modal kerja. Penelitian Yoga (2013) yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, NPL dan suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit memberikan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan suku bunga kredit berpengaruh terhadap penyaluran kredit, sedangkan NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Sedangkan penelitian Pratama (2010) tentang pengaruh suku bunga dan CAR terhadap penyaluran kredit memberikan hasil bahwa suku bunga dan CAR berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Penelitian Hasanudin (2010) tentang pengaruh tingkat suku bunga, NPL dan tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit memberikan hasil yang berbeda dimana tingkat suku bunga, NPL dan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan latar belakang masalah dan adanya penelitian terdahulu dengan hasil yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KUR PERIODE 2009-2011”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan upaya mengatasi masalah permodalan UMKM sebagaimana uraian di atas, Kementerian Negara Koperasi dan UKM turut memprakarsai program perkuatan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa penurunan dalam penyalurannya sehingga hasil yang dihasilkan tidak maksimal.

Perlambatan penyaluran KUR ini berdasarkan penelitian terdahulu diduga dipengaruhi oleh tingkat inflasi, suku bunga bank, pertumbuhan ekonomi, NPL dan CAR. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penyaluran KUR periode 2009-2011?
2. Apakah suku bunga bank berpengaruh terhadap penyaluran KUR periode 2009-2011?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyaluran KUR periode 2009-2011?
4. Apakah NPL (*Non Performing Loan*) berpengaruh terhadap penyaluran KUR periode 2009-2011?

5. Apakah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh terhadap penyaluran KUR periode 2009-2011?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran KUR periode 2009-2011.
2. Menganalisis pengaruh suku bunga bank terhadap penyaluran KUR periode 2009-2011.
3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyaluran KUR periode 2009-2011.
4. Menganalisis pengaruh NPL (*Non Performing Loan*) terhadap penyaluran KUR periode 2009-2011.
5. Menganalisis pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*) terhadap penyaluran KUR periode 2009-2011.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan dalam hal penyaluran kredit dan menjadi referensi di masa depan.

2. Bagi perumus kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perumusan kebijakan kredit maupun suku bunga di masa yang akan datang.
3. Bagi wirausahawan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pemilihan kredit dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan KUR.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Bab I atau pendahuluan berisi uraian hal-hal yang melatar belakangi alasan penulis mengambil tema mengenai pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, NPL dan CAR terhadap penyaluran KUR, selain itu juga menguraikan tujuan serta manfaat dari penelitian ini.

Bab II atau tinjauan pustaka memaparkan mengenai teori – teori yang berkaitan atau relevan dengan tema skripsi yang diangkat, selain itu juga menampilkan penelitian-penelitian terdahulu dengan tema dan variabel yang berkaitan sehingga dapat dijadikan acuan atau landasan. Pada Bab II juga digambarkan suatu kerangka pemikiran yang berupa *roadmap* untuk menerangkan alur penelitian serta hipotesis atau dugaan sementara terhadap variabel.

Bab III atau metode penelitian berisi mengenai penjelasan atas variabel (definisi operasional variabel), penjelasan mengenai jenis data dan darimana sumber data didapatkan, mengenai metode pengumpulan data dan bagaimana metode yang digunakan untuk menganalisis data.

Bab IV atau hasil dan pembahasan berisi hasil pengujian yang kemudian dapat diinterpretasikan dalam suatu kalimat pembahasan hasil.

Bab V atau penutup terdiri dari kesimpulan pada pembahasan atau interpretasi hasil, keterbatasan penelitian, dan saran terhadap pihak-pihak yang terkait dan harapan untuk penelitian di masa akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kredit**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan yaitu percaya bahwa peminjam dapat membayar kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Berasal dari bahasa latin *creditum* yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Menurut Rivai, dkk (2005:3) dalam Pandia (2012) “kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

###### **2.1.1.2 Jenis-Jenis Kredit**

Berdasarkan tujuan penggunaan dana oleh debitur menurut Susilo, Triandaru dan Santoso (2000), kredit dapat dibedakan menjadi :

1. Kredit Modal Kerja (KMK)

KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah.

2. Kredit Investasi

KI adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah.

### 3. Kredit Konsumsi

KK adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

#### **2.1.1.3 Jangka Waktu Kredit**

Berikut adalah jangka waktu kredit menurut Susilo, Triandaru dan Santoso (2000):

##### 1. Kredit jangka pendek

Ialah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

##### 2. Kredit jangka menengah

Ialah kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

##### 3. Kredit jangka panjang

Ialah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun yang biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

#### **2.1.1.4 Unsur-Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2003) adalah :

##### 1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang.

##### 2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### 3. Jangka Waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

### 4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

### 5. Balas jasa

Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan utama bank.

#### **2.1.1.5 Pengawasan Kredit**

Pengawasan kredit, menurut Fahmi dan Lavianti (2009), ada dua bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga pembiayaan yaitu:

#### 1. Pengawasan dengan model *preventif control*

Pengawasan dengan model ini dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal di kemudian hari. Kondisi ini mencerminkan kelengkapan berkas yang diajukan hingga tahap *survey* lapangan seperti jaminan dan bentuk usaha yang dilakukan calon debitur.



## 2. Pengawasan dengan model *represif control*

Pengawasan dalam model ini dilakukan pada saat kredit tersebut telah diberikan kepada debitur. Pengawasan ini diberikan dengan tujuan agar kreditur membangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu.

Pengawasan kredit dilakukan oleh pihak bank sebagai salah satu upaya menghindari kredit bermasalah di kemudian hari. Pengawasan ini meliputi beberapa aspek, yang meliputi keberadaan administrasi kredit yang memadai, kewajiban debitur menyampaikan laporan-laporan usaha yang dibutuhkan, kewajiban bagi pihak bank untuk melakukan kunjungan sewaktu-waktu ke perusahaan yang dibiayai oleh kredit, adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, dan aspek adanya suatu peringatan.

### **2.1.1.6 Penyelamatan Kredit Macet**

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode menurut Kasmir (2003) yaitu :

#### 1. *Rescheduling*, dengan cara :

##### a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

##### b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Dalam hal ini jangka waktu angsuran kredit diperpanjang pembayarannya. Jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jangka waktu angsuran.

## 2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

Bunga dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga

Diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

## 3. *Restructuring*

Yaitu dengan cara :

a. Menambah jumlah kredit.

b. Menambah *equity* dengan menyeter uang tunai atau tambahan dari pemilik.

#### 4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas.

#### 5. Penyitaan Jaminan

Ini merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik atau sudah tidak mampu membayar semua hutang-hutangnya.

### **2.1.2 Lembaga Keuangan**

#### **2.1.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan ini bertindak sebagai penyedia jasa keuangan dan untuk regulasinya diatur oleh pemerintah. Siamat (2004:4), pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non keuangan (*non financial assets*). Lembaga keuangan didefinisikan sebagai lembaga yang mengusahakan likuiditas dan keamanan-keamanan surat berharga (Siamat, 2004:4). Menurut Subagyo, dkk (1999:4) lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana (rumah tangga) dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana (pengusaha).

### 2.1.2.2 Fungsi Lembaga keuangan

Hadirnya lembaga keuangan ini menurut Subagyo, dkk (1999) adalah memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian. Lembaga keuangan ini juga berfungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Selain salah satu fungsi tersebut, lembaga keuangan juga mempunyai fungsi antara lain :

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan *instrument* kredit.
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana.
3. Memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu :
  - a. Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan sendiri dan kepentingan pihak lain (nasabah).
  - b. Lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya.
4. Memberikan jaminan  

Lembaga Keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
5. Menciptakan dan memberikan likuiditas

Lembaga Keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo.

### **2.1.2.3 Peranan Lembaga Keuangan**

Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan mempunyai peranan.

Peranan-peranan tersebut menurut Subagyo, dkk (1999) antara lain :

1. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang dilakukan (*transmission role*), misalnya :
  - a. Lembaga Keuangan (dalam hal ini bank sentral) mencetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dimaksudkan untuk memudahkan transaksi di antara masyarakat dan dalam perekonomian Indonesia.
  - b. Lembaga Keuangan (dalam hal ini bank umum) menerbitkan cek yang dimaksudkan untuk memudahkan transaksi yang dilakukan nasabahnya.
2. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermediation role*). Misalnya :
  - a. Lembaga Keuangan dapat sebagai broker, pialang, atau dealer dalam berbagai aktiva yang berperanan untuk meningkatkan efisiensi di antara kedua pihak.

- b. Lembaga Keuangan membantu menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjam yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi dan biaya informasi yang relatif lebih rendah dibandingkan apabila peminjam harus mencari dan melakukan transaksi langsung.
- c. Lembaga Keuangan dalam mengurangi kemungkinan risiko yang ditanggung pemilik dana atau penabung.

#### **2.1.2.4 Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan**

Lembaga Keuangan menurut Subagyo, dkk (1999) dikelompokkan menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah :

1. Kewajiban *financial* LKB dan LKBB, yaitu pada *liabilitas* atau *passiva* LKB berupa uang, sedang *liabilitas* atau *passive* LKBB yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai uang.
2. Kemampuan kedua lembaga keuangan dalam menciptakan kredit dan uang, yaitu LKB mempunyai kemampuan menciptakan kredit, mengedarkan uang, dan menambah JUB (melalui efek pengganda uang) sedang LKBB menyalurkan dana kepada masyarakat terutama melalui penyertaan modal atau membiayai investasi perusahaan.

Persamaannya LKB dan LKBB dalam hal :

1. Melancarkan pertukaran produk dengan menggunakan uang dan *instrument* kredit.

2. Membantu menyalurkan dana penabung (masyarakat yang kelebihan dana) kepada pengusaha (masyarakat yang memerlukan dana).

### **2.1.3 Bank**

#### **2.1.3.1 Pengertian Bank**

Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit atau dalam bentuk lain kepada masyarakat guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2003). Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

#### **2.1.3.2 Jenis Bank**

Menurut Mishkin (2001:8), secara sederhana menjelaskan bank sebagai lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinjaman. Jenis bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 ada 2, yaitu :

1. Bank Umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran (Subagyo dkk, 1999).

### **2.1.3.3 Fungsi Bank**

Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan lagi dalam bentuk kredit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai *financial intermediary*. Namun, secara lebih spesifiknya fungsi bank menurut Susilo, Triandaru dan Santoso (2000) dibedakan menjadi 3, yaitu :

1. *Agent of Trust*

Kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Sedangkan pihak bank sendiri harus percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya.

2. *Agent of Development*

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil yaitu memperlancar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

3. *Agent of Services*



Bank memberikan penawaran jasa-jasa lainnya kepada masyarakat, seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

#### **2.1.3.4 Bank Sebagai Lembaga Intermediasi**

Peranan lembaga keuangan semakin meningkat karena dunia usaha yang semakin tumbuh dengan pesat sehingga peran bank sebagai lembaga intermediasi sangat dibutuhkan di masyarakat. Menurut Siamat (2004:12) intermediasi dalam konteks lawan dari istilah disintermediasi adalah pelaksanaan fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi melalui cara penarikan dana dari penabung (*ultimate lenders*) kemudian meneruskan pinjamkannya kepada peminjam (*ultimate borrowers*). Inti intermediasi adalah penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. Ada 5 jenis intermediasi menurut Siamat (2004:13), yaitu:

1. Intermediasi denominasi

Intermediasi ini terjadi apabila lembaga intermediasi menerima tabungan dalam jumlah kecil kemudian memberikan kredit dalam jumlah yang jauh lebih besar.

2. Intermediasi risiko

Risiko tidak dibayarnya kembali kredit oleh debitur atau *default risk* merupakan risiko lembaga keuangan sendiri bukan risiko pemilik dana (penabung).

3. Intermediasi jatuh tempo

Intermediasi ini dilakukan lembaga keuangan dengan menerima simpanan dari penabung yang umumnya berjangka pendek kemudian memberikan pinjaman dalam waktu yang lebih panjang.

#### 4. Intermediasi informasi

Intermediasi ini berkaitan dengan proses penyediaan informasi kepada nasabah, baik yang tidak memiliki kesempatan mengikuti perkembangan pasar maupun yang memang tidak memiliki akses terhadap informasi yang relevan dengan kondisi pasar dan peluangpeluang.

#### 5. Intermediasi mata uang

Mata uang penabung sering tidak sesuai dengan kebutuhan mata uang yang diinginkan peminjam. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang menerima tabungan dalam berbagai mata uang dapat memenuhi kebutuhan mata uang yang diinginkan peminjam.

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* (perantara di bidang keuangan) (Santoso, 2006:9).

### **2.1.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

#### **2.1.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

UMKM merupakan pelaku ekonomi terbesar di Indonesia dan UMKM ini dianggap sebagai pengentas kemiskinan yang efektif karena mampu menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga mampu menangani masalah pengangguran. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

“UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id))

Batasan usaha menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, di definisikan sebagai berikut ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)):

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana yang diatur dalam UU. Yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan maksimal Rp 2,5 miliar.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih > Rp. 500 juta sampai s.d. Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan > Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 150 milyar.

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tabel Kriteria Jumlah Karyawan**

	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah Tenaga Kerja	< 4 orang	5-19 orang	20-99 orang	100 orang

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013*

#### **2.1.4.2 Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Sukirno (2004), mengelompokkan UMKM berdasarkan sudut pandang perkembangannya. Menurut perkembangannya, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dikelompokkan menjadi :

1. *Livelihood Activities*

Di Indonesia, kelompok usaha ini lebih dikenal sebagai kelompok usaha sektor informal. Usaha UMKM ini dianggap dan digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari demi pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima.

2. *Micro Enterprise*

Kelompok usaha ini melakukan kegiatan yang sifatnya cenderung sebagai pengrajin. Ia memiliki kemampuan menghasilkan suatu produk namun belum memiliki sifat kewirausahaan untuk memajukan produknya tersebut.

3. *Small Dynamic Enterprise*

Kelompok UMKM ini dalam menjalankan bisnisnya telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*

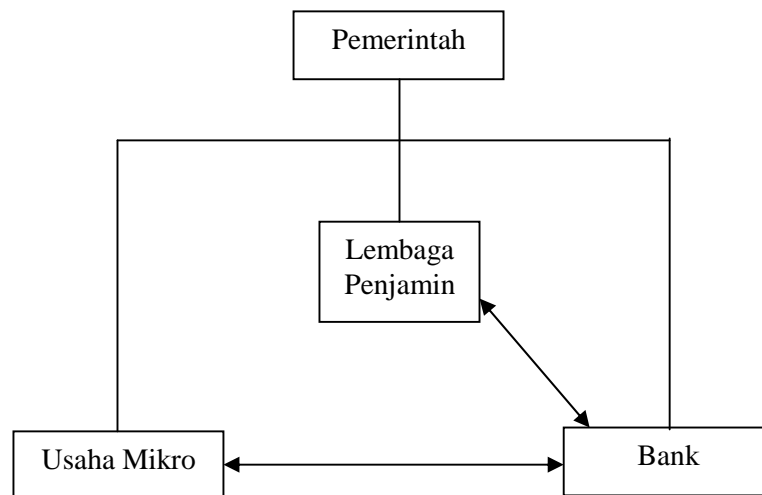
Kelompok UMKM ini selain telah memiliki jiwa kewirausahaan, juga memiliki tujuan memajukan usahanya dengan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

## 2.1.5 Kredit Usaha Rakyat

### 2.1.5.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Pengertian KUR menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)).

**Gambar 2.1**  
**Pola KUR Mikro**



Sumber : Pola KUR Mikro, 2008

Kredit Usaha Rakyat yang disingkat KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank (Gambar 2.1). KUR ini merupakan kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*). Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka

meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id).

KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, Bank Syariah Mandiri. Kredit Usaha Rakyat ini penyalurannya difokuskan untuk 5 sektor, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. KUR adalah skim penjaminan kredit yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan yang dijamin oleh Perum Jamkrindo dan PT Askrido [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id).

#### **2.1.5.2 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat**

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR, antara lain :

1. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha yang produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan:
  - a. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit / pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit / Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;

- b. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MOU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;
    - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
2. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan :
  - a. Untuk kredit sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun.
  - b. Untuk kredit di atas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tingkat bunga kredit / margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar / setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.
3. Bank pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



## **2.1.6 Inflasi**

### **2.1.6.1 Pengertian Inflasi**

Inflasi menurut Judisseno (2002:16) adalah salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barang-barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Sedangkan Sukirno (2004:15) mengemukakan definisi inflasi yaitu inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.

Adapun karakteristik umum inflasi adalah:

1. Terdapat kecenderungan harga-harga untuk meningkat artinya mungkin saja terjadi peningkatan atau penurunan tingkat harga pada suatu waktu, tetapi tetap menunjukkan adanya kecenderungan meningkat.
2. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus tidak pada waktu tertentu saja.
3. Mencakup pengertian tingkat harga umum (*General Price Level*), yaitu kenaikan tingkat harga bukan saja untuk satu atau berbagai komoditi, tetapi mencakup seluruh komponen indeks agregat atau GNP deplator.

### **2.1.6.2 Jenis-Jenis Inflasi**

Menurut Putong (2002:260) jenis-jenis inflasi itu dibagi ke dalam 3 bagian yaitu:

1. Inflasi Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu sebagai berikut.

- a. Inflasi merayap/rendah (*creeping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10%
- b. Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10-30% pertahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30%, dan sebagainya
- c. Inflasi berat (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan bahkan menurut istilah ibu-ibu rumah tangga harga berubah.
- d. Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit ( di atas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukar dengan barang.

## 2. Inflasi Berdasarkan Sebabnya

- a. *Demand Pull Inflation*. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak, di pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*), akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk

mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.

- b. *Cost Push Inflation*. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh/menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan sebagainya). Akibat naiknya biaya produksi, maka dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen, yaitu : pertama, langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik (karena tarik menarik permintaan dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

### 3. Inflasi Berdasarkan Asalnya

Berdasarkan asalnya inflasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain itu harga-harga naik dikarenakan musim paceklik (gagal panen), bencana alam yang berkepanjangan dan sebagainya. Kedua inflasi yang berasal dari luar negeri. Karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-harga barang dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus

mengimpor barang tersebut maka harga jualnya di dalam negeri tentu saja bertambah mahal.

### **2.1.6.3 Faktor-Faktor Yang Menimbulkan Inflasi**

Berdasarkan kepada faktor-faktor yang menimbulkan inflasi menurut Sukirno (2004:303-305) inflasi dapat dibedakan kepada dua jenis : inflasi tarikan permintaan dan inflasi desakan biaya.

#### **1. Inflasi Tarikan Permintaan**

Inflasi tarikan permintaan terjadi apabila sektor perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat yang wujud dalam pasaran masalah kekurangan barang akan berlaku dan ini akan mendorong kepada kenaikan harga-harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Dalam periode seperti ini permintaan masyarakat bertambah dengan pesat dan perusahaan-perusahaan pada umumnya akan beroperasi pada kapasitasnya yang maksimal. Kelebihan-kelebihan permintaan yang masih wujud akan menimbulkan kenaikan harga-harga.

#### **2. Inflasi Desakan Biaya**

Inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga-harga produksi. Pertumbuhan biaya produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga, walaupun mereka harus mengambil resiko akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksinya.

## **2.1.7 Suku Bunga**

### **2.1.7.1 Pengertian Bunga Bank**

Kasmir (2003:121) mengungkapkan bahwa bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga dapat juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah (yang memperoleh pinjaman) kepada bank.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

#### **1. Bunga Simpanan**

Adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contohnya, jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

#### **2. Bunga Pinjaman**

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus di bayar oleh nasabah peminjam kepada Bank. Contohnya, bunga kredit.

### **2.1.7.2 Fungsi Suku Bunga**

Suku bunga mempunyai beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian, yaitu :

1. Membantu mengalirkan tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian.
2. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi.
3. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.
4. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

### **2.1.7.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga**

Untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya. Artinya, baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya. Kasmir (2003:122) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga, antara lain:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada di simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti untuk bunga simpanan maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus ada di bawah bunga pesaing.

### 3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

### 4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar, dan sebaliknya.

### 5. Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya.

### 6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan, dan sebaliknya.

### 7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet dimasa mendatang relatif kecil, dan sebaliknya.

#### 8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

#### 9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini berdasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganyapun berbeda dengan nasabah biasa.

#### 10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitasnya terhadap bank maka bunga yang dibebankan pun juga berbeda.

### **2.1.8 Pertumbuhan Ekonomi**

#### **2.1.8.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan



idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2007:57).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Menko perekonomian Hatta Rasaja menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk menampung penambahan angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi satu persen hanya bisa

menampung 350.000 pekerja, menurut sekenario optimistis Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, perekonomian hanya bisa tumbuh rata-rata 6,9 persen per tahun dalam lima tahun kedepan. Untuk memecuh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah mesti bekerja keras untuk menghapus segala macam hambatan seperti infrastruktur yang buruk, ketersediaan energi, pembiayaan yang mahal. (Kompas,2009)

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Yang perlu diperhatikan adalah sisi output totalnya (PDB) dan jumlah penduduknya. Output perkapita adalah kenaikan output total dibagikan dengan jumlah regional digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertumbuhan penduduk, atau ada tidaknya perubahan dalam struktur ekonomi (Sukirno,2004:19). Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan - kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik (Arsyad, 1999).

Menurut Rahardja, istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu Negara. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produk barang dan jasa meningkat. Angka yang digunakan untuk menaksir pertumbuhan ekonomi adalah PDRB harga konstan karena telah dihilangkan pengaruh inflasinya.

Hal ini sejalan dengan pendapat I Made Dharma Setiawan yang menyatakan bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Untuk melihat peningkatan jumlah barang yang dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan dengan cara melakukan perhitungan pendapatan daerah yang didasarkan atas harga konstan.

Sedangkan menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut pandangan para ekonom klasik maupun ekonom neoklasik, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan (Kuncoro, 2004)

#### **2.1.8.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Prof. Simon Kuznets (Boediono, 2001), pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang – barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan 3 ciri pokok, yaitu: Laju pertumbuhan,

pendapatan perkapita riil, distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkah dan pola persebaran penduduk.

#### 1. Teori Pertumbuhan Klasik

Adam Smith sebagai pelopor teori klasik mengatakan bahwa output akan berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk. Pertambahan penduduk berarti peningkatan produk nasional. Teori pertumbuhan klasik juga mengemukakan keterkaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk yang dikenal dengan teori penduduk optimum. Teori ini menyatakan bahwa :

Apabila produksi marginal lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita, jumlah penduduk sedikit dan tenaga kerja masih kurang, maka pertambahan jumlah penduduk akan menambah tenaga kerja dan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Penduduk akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia, tetapi terjadi penurunan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang peningkatannya semakin kecil. Apabila produk marginal bernilai sama dengan pendapatan per kapita, yang berarti pendapatan perkapita yang maximum dengan jumlah penduduk optimal, maka pertambahan penduduk akan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### 2. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Menurut Robert Solow, pertumbuhan produk nasional ditentukan oleh pertumbuhan dua jenis input (pertumbuhan modal dan pertumbuhan tenaga kerja), kemajuan teknologi dan peningkatan keahlian serta

keterampilan tenaga kerja. Apabila terjadi penambahan modal, berarti terjadi peningkatan kegiatan usaha yang akan memperluas lapangan pekerjaan. Produksi optimum baru akan diperoleh apabila diikuti dengan kemajuan teknologi dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja. Selanjutnya, produktivitas akan meningkat dan terjadilah pertumbuhan produk nasional di wilayah tersebut.

Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari berbagai perubahan, yaitu: perubahan reorganisasi ekonomi, perubahan pandangan masyarakat, perubahan cara menabung atau menanam modal serta perubahan pandangan terhadap faktor alam.

### 3. Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu:

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output

(*Capital-Output Ratio* atau COR) dan rasio pertambahan modal-output (*Incremental Capital-Output Ratio* atau ICOR).

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Arsyad, 1999:64-67).

### **2.1.8.3 Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi**

Para ekonom aliran klasik yang telah mempelajari gejala pertumbuhan ekonomi, melihat bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan teori produksi (Teori Ekonomi Mikro), telah diperkenalkan dengan fungsi produksi klasik sederhana (Pratama dan Manurung, 2008: 136):

$$Q = f(K, L)$$

dimana:

Q = output

K = barang modal

L = tenaga kerja

Untuk analisis pertumbuhan ekonomi (analisis makro), model klasik tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat ditulis persamaan:

$$Q = f(K, L, T, U)$$

dimana:

Q = output atau PDB

K = barang modal

L = tenaga kerja

T = teknologi

U = uang

$$Q/K; Q/L; Q/T; Q/U > 0$$

Persamaan diatas secara sederhana menunjukkan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi tersebut (Pratama dan Manurung, 2008: 136-137) :

#### 1. Barang Modal

Ekonomi akan tumbuh, jika stok barang modal ditambah. Penambahan stok barang modal dilakukan lewat investasi. Karena itu salah satu upaya pokok untuk meningkatkan investasi adalah menangani faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Pertumbuhan ekonomi baru dimungkinkan jika investasi neto lebih besar daripada nol. Sebab, jika investasi neto sama dengan nol, perekonomian hanya dapat memproduksi pada tingkat sebelumnya. Akan lebih baik lagi, jika penambahan kuantitas barang modal juga disertai peningkatan kualitas.

#### 2. Tenaga kerja

Sampai saat ini, khususnya di Negara Sedang Berkembang (NSB), tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Yang menjadi persoalan adalah sampai berapa banyak penambahan tenaga kerja akan terus meningkatkan output. Hal ini sangat tergantung dari seberapa cepat terjadinya *The Law of Diminishing Return* (TLDR). Sedangkan cepat atau lambatnya proses TLDR sangat ditentukan oleh kualitas SDM dan keterkaitannya dengan kemajuan teknologi produksi. Selama ada sinergi antara tenaga kerja dan teknologi, penambahan tenaga kerja akan memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang dapat dilibatkan dalam proses produksi akan semakin sedikit bila teknologi yang digunakan makin tinggi. Sehingga akan terjadi trade-off antara efisiensi produktivitas dan kesempatan kerja. Untuk meningkatkan output secara efisien, pilihan yang rasional adalah teknologi padat modal. Harga dari pilihan tersebut adalah menciutnya kesempatan kerja.

### 3. Teknologi

Penggunaan teknologi yang makin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi, jika hanya dilihat dari peningkatan output. Namun ada *trade off* antara kemajuan teknologi dan kesempatan kerja. Lebih dari itu, kemajuan teknologi makin memperbesar ketimpangan ekonomi antar bangsa, utamanya bangsabangsa maju serta dunia ketiga atau Negara Sedang Berkembang (NSB).



#### 4. Uang

Dalam perekonomian modern, uang memegang peranan dan fungsi sentral. Tidak mengherankan makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dihasilkan. Tetapi dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaannya efisien. Jika terdapat perusahaan –perusahaan yang tidak memiliki cukup uang, namun memiliki prospek yang baik maka banyak bank atau lembaga keuangan yang mau membantu, misalnya dengan memberikan kredit. Hanya saja minat meminjam, sangat tergantung dari besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan, terutama bunga pinjaman. Sedangkan bunga pinjaman dapat ditekan, jika sistem keuangan berjalan efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang sangat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, selama penggunaannya sangat efisien. Tingkat efisiensi penggunaan uang sangat ditentukan oleh tingkat efisiensi sistem perbankan.

##### **2.1.9 NPL (*Non Performing Loan*)**

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Menurut Dahlan Siamat (2004:92) resiko kredit merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan. Resiko kredit di dalamnya termasuk *non performing loan*. *Non performing loan* (NPL) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur

tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Hal ini juga dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2009) yang menyebutkan bahwa kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Selain itu As. Mahmoedin (2002:3) juga mengatakan kredit bermasalah merupakan kredit dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan agunan.

Menurut Dahlan Siamat (2001:174) menjelaskan kredit bermasalah sebagai berikut kredit bermasalah/problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit bermasalah menjadi bermasalah dapat dikarenakan kredit bermasalah dapat dikarenakan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit. Yang termasuk ke dalam *non performing loan* adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Peningkatan NPL dalam jumlah

yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah  $\leq 5\%$  dari total portofolio kreditnya (SEBI, 2009).

Rumus NPL menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuty (2004) :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

#### 2.1.10 CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

CAR merupakan rasio antara modal sendiri terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan Asset Bank masih dapat ditutup oleh Equity bank yang tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank (Ambarwati, 2010). Sesuai dengan Surat Edaran BI Nomor: 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993 besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu bank minimal 8% sejak akhir tahun 1995, dan sejak akhir tahun 1997 CAR yang harus dicapai minimal 9%. Tetapi karena kondisi perbankan nasional sejak akhir 1997 terpuruk yang ditandai dengan banyaknya bank yang dilikuidasi, maka sejak Oktober tahun 1998 besarnya CAR diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Klasifikasi bank sejak 1998 sampai 2007 dikelompokkan dalam: (1) Bank sehat dengan klasifikasi A, jika memiliki CAR lebih dari 8%, (2) Bank *take over* (BTO) atau dalam

penyehatan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan klasifikasi B, jika bank tersebut memiliki CAR antara –25% sampai dengan < dari 8%, (3) Bank Beku Operasi (BBO) dengan klasifikasi C, jika memiliki CAR kurang dari –25%. Bank dengan klasifikasi C inilah yang di likuidasi. Rumus NPL menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuty (2004) :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

## 2.2 Hubungan antara variable dependen dengan variable independen

Hubungan antara variable independen dengan variable dependen menjelaskan tentang adanya keterkaitan antara variable dependen dengan variable independen.

### 2.2.1 Hubungan Antara Inflasi dengan Penyaluran KUR

Menurut Boediono (2001:156) dengan menggunakan asumsi suku bunga riil jika terjadi inflasi naik maka expected profit akan mengalami kenaikan dan permintaan kredit turut juga mengalami kenaikan, tetapi jika inflasi naik yang diakibatkan dengan kenaikan nominal interest rate, sehingga permintaan kredit juga akan naik. Dimana inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi (*Cost Push Inflation*) adalah inflasi yang timbul karena berkurangnya penawaran akibat kenaikan produksi.

Inflasi sangat berpengaruh dengan permintaan kredit perbankan, dikarenakan inflasi berarti juga kenaikan harga. Semakin naiknya harga, maka seseorang akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan, dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan cara mengajukan permintaan kredit

dengan menggunakan asumsi suku bunga riil. Oleh karena itu maka dengan adanya kenaikan inflasi maka permintaan akan kredit juga semakin meningkat, sebagaimana dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Faza Rifai (2005).

### **2.2.2 Hubungan Antara Suku Bunga Kredit dengan Penyaluran KUR**

Tingkat suku bunga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkreditan di pasar kredit dimana tingkat suku bunga yang berlaku menunjukkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi kredit. Bagi peminta kredit maka bunga yang rendah akan sangat diminati dan sebaliknya jika bunga tinggi maka mereka akan berfikir dan tidak berminat untuk mengambil kredit. Suku bunga berpengaruh langsung terhadap tingkat suku bunga kredit perbankan.

Suku bunga kredit mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kredit. Semakin tinggi suku bunga kredit maka akan menyebabkan beban masyarakat dalam melunasi pinjaman kreditnya semakin berat, dan akan mengurangi minat masyarakat untuk melakukan pinjaman kredit yang berakibat menurunnya kredit yang disalurkan. Sebaliknya semakin rendah tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan maka beban masyarakat akan lebih ringan yang berdampak meningkatnya jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat (Wardoyo, 2003).

### **2.2.3 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Penyaluran KUR**

Model Pertumbuhan Ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod-Domar, menekankan betapa pentingnya masyarakat untuk menabung guna mendukung

kegiatan investasi yang akan mendorong pertumbuhan yang direpresentasikan oleh peningkatan pendapatan nasional. Untuk peningkatan pendapatan nasional diperlukan tambahan kapital stok dalam jumlah tertentu, sehingga terdapat rasio antara pendapatan nasional dan kapital stok (*capital-output ratio*). Model Harrod-Domar menunjukkan betapa pentingnya tabungan (*saving*) untuk mendukung investasi guna menciptakan pertumbuhan. Menurut Domar Peningkatan tabungan akan meningkatkan kapital stok, yang berarti tersedianya dana untuk mendukung investasi. Penyaluran dana kepada dunia usaha maka akan dapat meningkatkan output yang dihasilkannya.

Salah satu komponen dari pertumbuhan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pertumbuhan ekonomi (Sadono Sukirno, 2004). Dapat dijelaskan bahwa, jika suatu negara atau daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka mereka beranggapan untuk tidak beresiko mengambil kredit. Dengan kata lain bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkatkan kemampuan dan keinginan untuk melakukan ekspansi dan untuk melakukan ekspansi membutuhkan modal yang lebih besar. Dalam hal ini untuk melakukan ekspansi tersebut, seorang wirausahawan akan memutuskan untuk mengambil kredit. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyaluran kredit.

#### **2.2.4 Hubungan Antara NPL dengan Penyaluran KUR**

*Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-*cover* risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL

maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (B.A. Pratama 2010). Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit (Sentausa, 2009).

NPL yang tinggi mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena menurunkan perputaran dana bank sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Dengan kata lain NPL menurunkan profitabilitas bank. NPL juga memaksa bank membentuk sejumlah cadangan guna menjaga likuiditas dan solvabilitas bank untuk melindungi depositan. Semakin besar NPL semakin besar *opportunity cost* yang harus ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, NPL harus diupayakan serendah mungkin. BI mengaturnya dengan menetapkan ketentuan bahwa pada Juni 2003, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia harus mempunyai rasio NPL max 5 % (Nasiruddin, 2005). Soedarto (2004), menyimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, jumlah kredit non lancar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap besar kecilnya penyaluran kredit. Oleh karena itu semakin besar kredit non lancar maka jumlah kredit yang dapat disalurkan semakin kecil, begitu pula sebaliknya.

#### **2.2.5 Hubungan Antara CAR dengan Penyaluran KUR**

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh

kegiatan operasi bank (Ali, 2004). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20 - 25 persen setahun (Wibowo, 2009). Kiat yang banyak ditempuh oleh bank untuk memperkuat CAR dalam rangka menggenjot ekspansi kredit pada tahun berikutnya adalah dengan penerbitan obligasi subordinasi (*subdebt*) dan *right issue* (Investor Daily, 2009). Sehingga semakin tinggi CAR dari suatu bank, maka akan semakin lancar pula penyaluran kredit yang dikucurkannya.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel dan metode analisis	Hasil
1.	Etik Kristanti (2013)	Pengaruh Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	<b>Variabel bebas</b> Suku bunga BI <b>Variabel terikat</b> Kredit usaha rakyat <b>Metode analisis</b> Regresi berganda	Suku bunga (SBI) berpengaruh negative terhadap penyaluran kredit usaha rakyat
2.	Engkus Kusnandar (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit UMKM (KUR) Oleh Perbankan di Indonesia	<b>Variabel bebas</b> CAR NPL DPK BOPO ROA PDB Inflasi Kurs	BOPO berpengaruh negative terhadap penyaluran KUR. DPK, ROA, Inflasi berpengaruh positif terhadap penyaluran KUR. CAR, NPL, PDB dan kurs tidak berpengaruh terhadap



			<b>Variabel terikat</b> Kredit modal kerja <b>Metode analisis</b> Regresi berganda	penyaluran KUR
3.	Choirin Nikmah, Hari Sukarno dan Ana Mufidah (2014)	Analisis Implikasi Penyaluran KUR pada Pedagang Kecil di Pasar Tanjung Jember	<b>Variabel bebas</b> PDB Suku bunga SBI <b>Variabel terikat</b> Penyaluran KUR <b>Metode analisis</b> Regresi berganda.	PDB, dan suku bunga BI rate berpengaruh terhadap penyaluran KUR.
4.	Diajeng Sarsa Putranto (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran KUR	<b>Variabel bebas</b> Inflasi Suku bunga NPL <b>Variabel terikat</b> Penyaluran kredit <b>Metode analisis</b> Regresi berganda.	Inflasi, suku bunga dan NPL tidak berpengaruh terhadap penyaluran KUR.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Inflasi sangat berpengaruh dengan permintaan kredit perbankan, dikarenakan inflasi berarti juga kenaikan harga. Semakin naiknya harga, maka seseorang akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan, dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan cara mengajukan permintaan kredit dengan menggunakan asumsi suku bunga riil. Oleh karena itu maka dengan adanya kenaikan inflasi maka permintaan akan kredit juga semakin meningkat, sebagaimana dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Faza Rifai (2005).

Tingkat suku bunga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkreditan di pasar kredit dimana tingkat suku bunga yang berlaku menunjukkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi kredit. Bagi peminta kredit maka bunga yang rendah akan sangat diminati dan sebaliknya jika bunga tinggi maka mereka akan berfikir dan tidak berminat untuk mengambil kredit. Suku bunga berpengaruh langsung terhadap tingkat suku bunga kredit perbankan.

Salah satu komponen dari pertumbuhan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pertumbuhan ekonomi (Sadono Sukirno, 2004). Dapat dijelaskan bahwa, jika suatu negara atau daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka mereka beranggapan untuk tidak beresiko mengambil kredit. Dengan kata lain bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkatkan kemampuan dan keinginan untuk melakukan ekspansi dan untuk melakukan ekspansi membutuhkan modal yang lebih besar.

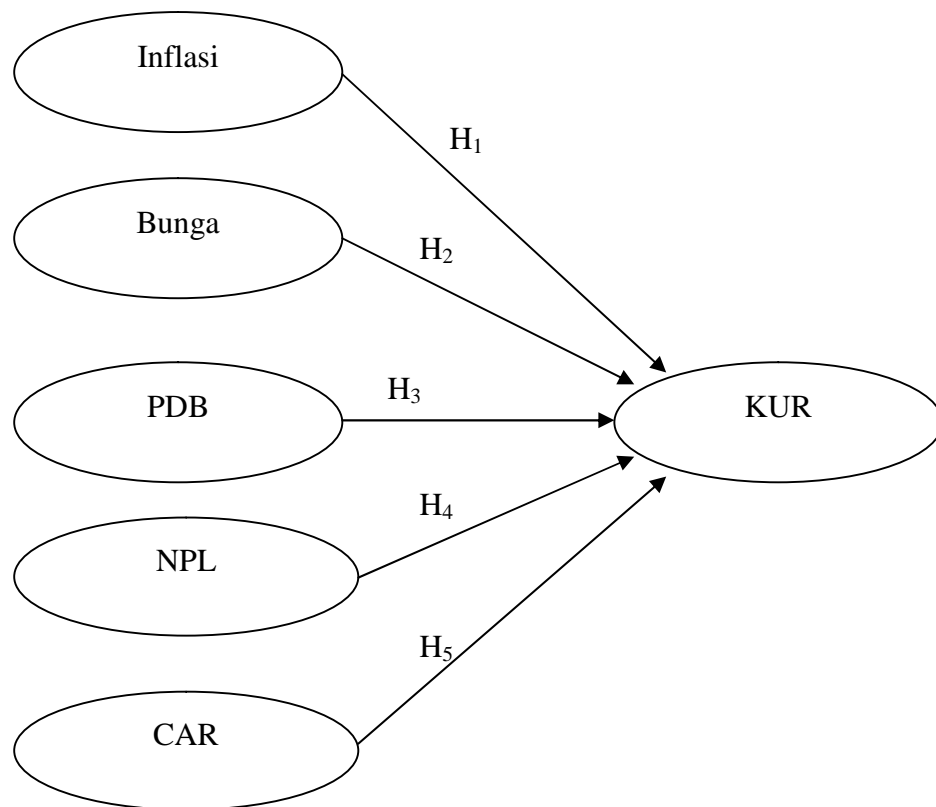
Dalam hal ini untuk melakukan ekspansi tersebut, seorang wirausahawan akan memutuskan untuk mengambil kredit. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyaluran kredit.

NPL yang tinggi mengakibatkan tidak bekerjanya fungsi intermediasi bank secara optimal karena menurunkan perputaran dana bank sehingga memperkecil kesempatan bank memperoleh pendapatan. Dengan kata lain NPL menurunkan profitabilitas bank. NPL juga memaksa bank membentuk sejumlah cadangan guna menjaga likuiditas dan solvabilitas bank untuk melindungi depositan. Semakin besar NPL semakin besar *opportunity cost* yang harus ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, NPL harus diupayakan serendah mungkin. BI mengaturnya dengan menetapkan ketentuan bahwa pada Juni 2003, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia harus mempunyai rasio NPL max 5 % (Nasiruddin, 2005). Soedarto (2004), menyimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5%, jumlah kredit non lancar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap besar kecilnya penyaluran kredit. Oleh karena itu semakin besar kredit non lancar maka jumlah kredit yang dapat disalurkan semakin kecil, begitu pula sebaliknya.

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali, 2004). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan

kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20 - 25 persen setahun (Wibowo, 2009).

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. **H<sub>1</sub> : Tingkat inflasi diduga berpengaruh terhadap penyaluran KUR.**
2. **H<sub>2</sub> : Tingkat suku bunga diduga berpengaruh terhadap penyaluran KUR.**
3. **H<sub>3</sub> : Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh terhadap penyaluran KUR.**
4. **H<sub>4</sub> : NPL diduga berpengaruh terhadap penyaluran KUR.**
5. **H<sub>5</sub> : CAR diduga berpengaruh terhadap penyaluran KUR.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Untuk mengurangi dan menghindari terjadinya kekaburan dalam pembahasan, perlu untuk memberikan pengertian atau definisi operasional dari masing-masing variabel yang dibahas, variabel-variabel tersebut adalah :

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam penelitian ini adalah tingkat penyaluran KUR setiap bulan dari tahun 2009-2011 dalam satuan rupiah.
2. Inflasi (INF) adalah tingkat inflasi setiap bulan dari tahun 2009-2011 dalam satuan persen.
3. Suku Bunga (BUNGA) adalah tingkat suku bunga pinjaman setiap bulan dari tahun 2009-2011 dari SBI dalam satuan persen.
4. Pertumbuhan Ekonomi (PEKO) adalah tingkat pertumbuhan ekonomi setiap bulan dari tahun 2009-2011 dengan infikator PDB dalam satuan rupiah.
5. *Non Performing Loan* (NPL) adalah tingkat kredit macet setiap bulan dari tahun 2009-2011 dalam satuan persen.
6. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal setiap bulan dari tahun 2009-2011 dalam satuan persen.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala sesuatu yang diketahui atau dianggap mempunyai sifat bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan (Sugiyono, 2004). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

### 3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

#### 3.4.1 Model Regresi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: tingkat inflasi (INF), tingkat suku bunga (BUNGA), pertumbuhan ekonomi (PDB), *Non Performing Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap variabel terikatnya yaitu penyaluran KUR (KUR).

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$\text{KUR} = a + b_1\text{INF} + b_2\text{BUNGA} + b_3\text{PDB} + b_4\text{NPL} + b_5\text{CAR} + e$$

Keterangan :

a	= Konstanta
$b_1, b_2, b_3, b_4, b_5$	= Koefisien garis regresi
e	= <i>error</i> / variabel pengganggu
KUR	= Penyaluran KUR
INF	= Tingkat inflasi
BUNGA	= Suku bunga
PDB	= Pertumbuhan ekonomi
NPL	= <i>Non Performing Loan</i>
CAR	= <i>Capital Adequacy Ratio</i>

### 3.4.2 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Untuk meyakinkan bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dan dapat dipergunakan (valid) untuk mencari peramalan, maka akan dilakukan pengujian asumsi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas.

#### 1. Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:



- Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2011).
- Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Apabila antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas (Ghozali, 2011).
- Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2011).

Apabila di dalam model regresi tidak ditemukan deteksi seperti di atas, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas, dan demikian pula sebaliknya.

## 2. Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*.

Dasar analisisnya adalah:

- Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3. Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2011). Pada

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah (Ghozali, 2011):

- Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### **3.4.3 Pengujian Hipotesis**

#### **1. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel bebas benar-benar berpengaruh terhadap variabel terikat secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2011).

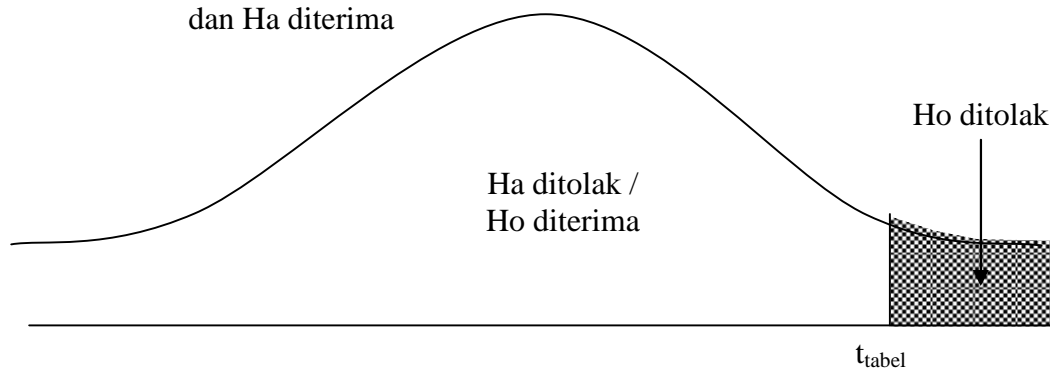
Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:

$H_0$  : Variabel-variabel bebas (tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan pertumbuhan ekonomi) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (penyaluran KUR).

$H_a$  : Variabel-variabel bebas (tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, NPL, CAR) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (penyaluran KUR).

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2011) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

- Apabila angka probabilitas signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- Apabila angka probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima



## 2. Uji Ketepatan model ( Uji Statistik F )

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0$  : Variabel-variabel bebas yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, NPL, CAR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu penyaluran KUR.

$H_a$  : Variabel-variabel bebas yaitu, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, NPL, CAR mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu penyaluran KUR.

Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2011) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

- Apabila probabilitas signifikansi  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- Apabila probabilitas signifikansi  $< 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

### 3. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2011). Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas (tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, NPL, CAR) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (penyaluran KUR) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted*  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model

regresi yang terbaik. Tidak seperti  $R^2$ , nilai Adjusted  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.